

MEMAKNAI NILAI KEADILAN SOSIAL DALAM PROGRAM PENCEGAHAN HIV/AIDS

Fitriana Andini Putri, Aris Prio Agus Santoso, Siti Fathonah, Yunita Nur Hidayah,
Ivan Dwi Fitriadi, Hanifah Putri azzahra, Kharisma Dwi Defita Sari, Fadillah Falsa
Tahara

Prodi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyiyah Surakarta
Email: info@aiska-university.ac.id.

Abstrak

Perilaku menyimpang dapat menyebabkan seseorang terkena HIV/AIDS, dan stigma terhadap penderita HIV/AIDS dapat mempengaruhi program pencegahan dan kualitas hidup penderita. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna nilai keadilan sosial dalam program pencegahan HIV/AIDS. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan library research dengan pengumpulan data sekunder, hasilnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila dianggap sebagai cara hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Ini berfungsi sebagai panduan untuk semua kegiatan dan kehidupan di semua bidang. Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila bertujuan untuk memastikan perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara Indonesia. Namun, ada praktik dinamis dalam penerapan prinsip keadilan sosial, terutama dalam konteks individu yang hidup dengan HIV/AIDS, yang mengakibatkan diskriminasi dan pembatasan hak dan kebebasan mereka. Hal ini menyoroti perlunya pemahaman yang lebih dalam dan implementasi prinsip keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia.

Kata kunci: Keadilan sosial, Pancasila, Penderita HIV.

Abstract

This research discusses the role of Pancasila in interpreting the value of social justice in HIV/AIDS prevention programs. Deviant behavior can cause a person to contract HIV/AIDS, and stigma towards HIV/AIDS sufferers can affect prevention programs and the sufferer's quality of life. This research uses a quantitative approach and highlights the importance of public education to reduce stigma towards HIV/AIDS sufferers. There is still public ignorance about the transmission of HIV/AIDS, and discrimination against teenagers suffering from HIV/AIDS also still occurs. This research also discusses the implementation of the meaning of the 5th principle in HIV prevention and the problem of injustice among teenagers suffering from HIV. Pancasila is considered the way of life and ideology of the Indonesian nation. It serves as a guide to all activities and life in all areas. The principles of social justice in Pancasila aim to ensure

fair treatment and equal opportunities for all Indonesian citizens. However, there are dynamic practices in the application of social justice principles, especially in the context of individuals living with HIV/AIDS, which result in discrimination and restrictions on their rights and freedoms. This highlights the need for deeper understanding and implementation of social justice principles in Indonesian society.

Keywords: Social justice, Pancasila, HIV sufferers.

1. Pendahuluan

3.1. Latar Belakang

Salah satu hambatan dalam penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS adalah kentalnya stigma dan diskriminasi di masyarakat. Stigma terhadap orang yang terkena HIV adalah suatu sifat yang menghubungkan seseorang yang terinfeksi HIV dengan nilai-nilai negatif yang diberikan oleh masyarakat. Bagi sebagian orang, menjadi ODHA (Orang Dengan Hiv Aids) identik dengan orang yang berdosa, berbuat "nakal" atau amoral. Perlakuan terhadap ODHA sering kali digambarkan dalam sikap sinis, menjauhi dan perasaan ketakutan yang berlebihan pada ODHA.

Tanpa disadari, hal ini berdampak besar pada program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS termasuk kualitas hidup ODHA. Populasi berisiko akan merasa takut untuk melakukan tes HIV karena apabila terungkap hasilnya reaktif akan menyebabkan mereka dikucilkan. ODHA merasa takut mengungkapkan status HIV dan memutuskan menunda bahkan enggan untuk berobat apabila menderita sakit, dan akan berdampak pula pada semakin menurunnya tingkat kesehatan mereka serta penularan HIV tidak dapat dikontrol.

Perilaku menyimpang ini merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Bentuk dari perilaku menyimpang itu sendiri dapat berupa penyimpangan kriminal, penyimpangan seksual, penyimpangan gaya hidup dan penyimpangan dalam bentuk pemakaian berlebihan. Perilaku menyimpang tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor lingkungan dan faktor pribadi. Dari perilaku menyimpang tersebut dapat menyebabkan seseorang terkena penyakit HIV/AIDS. HIV/AIDS dapat menular melalui perilaku berisiko HIV/AIDS diantaranya penggunaan jarum, mengidap penyakit menular seksual, berhubungan seks melalui anus, pekerjaan seks komersial, dan hubungan seksual berganti-ganti pasangan.

Hal itu tentu bertentangan dengan salah satu sila dalam Pancasila, yaitu sila ke-5 yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila tersebut mengungkapkan bahwa kita mesti memandang sama rata kepada sesama. Hal itu dipengaruhi oleh struktur dasar masyarakat yang belum menghargai hak atas individu sebagai suatu kewajiban moral. Selain itu ada unsur kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap virus HIV/AIDS dan munculnya situasi yang menyebabkan masyarakat merasa tidak aman dan takut tertular virus tersebut.

Hal itu tentu menimbulkan problem bagi penderita HIV/AIDS karena hak kebebasan mereka dibatasi. Namun demikian, ditemukan juga bahwa penderita umumnya tak berani membuka status secara terbuka, meskipun beberapa responden juga bersikap terbuka. Untuk mengatasi diskriminasi terhadap anak yang terpapar HIV/AIDS, peneliti mengungkapkan perlunya edukasi kepada masyarakat. Edukasi tersebut juga bertujuan untuk menciptakan persepsi publik yang semakin terbuka terhadap penderita HIV/AIDS.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana Peranan Pancasila Dalam Memaknai Nilai Keadilan Sosial Pada Program Pencegahan hiv?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan salah satu pendekatan penelitian yang berfokus pada perolehan lebih dalam terhadap suatu fenomena atau masalah melalui pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Dikutip dari website Binus University, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pengamatan dalam konteks alami.

Dalam pendekatan ini, peneliti memainkan peran utama yang terlibat secara langsung dalam pengumpulan dan interpretasi data. Dan hasil akhir yang diharapkan adalah adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai apa dan bagaimana penggunaan metode kualitatif ini dengan catatan dapat menghasilkan hasil yang komprehensif.

4. Hasil Pembahasan

Penyebab utama faktor penularan HIV/AIDS adalah hubungan seks beresiko pada LSL (Lelaki Seks Lelaki), heteroseksual, perinatal, penggunaan jarum suntik tidak steril pada penusun, dan faktor tak diketahui. Kurang optimalnya program pendidikan

kesehatan dan kurang dewasanya cara berpikir anak usia ≤ 19 tahun, mengakibatkan anak-anak yang menderita virus HIV/AIDS sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dan tidak adil. Studi terhadap implementasi keadilan sosial pada anak penderita HIV/AIDS masih terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang menginvestigasi persoalan implementasi konsep keadilan sosial Pancasila pada penderita HIV/AIDS di Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi dasar penelitian selanjutnya untuk mengembangkan konsep keadilan sosial Pancasila berdasarkan pandangan masyarakat rentan, serta menginvestigasi peran nilai-nilai keadilan sosial bagi kehidupan masyarakat.

1. Implementasi Pemaknaan Sila Ke-5 Dalam Pencegahan Hiv

Dalam pemaknaan nilai pancasila pada pencegaha hiv terkait dalam sila ke-5, membahas tentang “adil” tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tentang keadilan individual. Pembahasan ini meliputi kewajiban masing-masing orang untuk bertindak dengan adil terhadap sesamanya dengan menjamin haknya dan memperlakukan siapapun tanpa diskriminasi dalam situasi yang sama. Meski demikian, menurut Suseno, keadilan sosial lebih dari hal tersebut. Ia tidak tergantung dari kehendak baik individu-individu yang langsung terlibat dalam suatu hubungan mikro, melainkan melibatkan struktur yang lebih luas, seperti struktur- struktur ekonomis, sosial, dan politik seluruh masyarakat. Sehingga, keadilan sosial dapat didefinisikan sebagai keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses-proses ekonomis, politis, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat. Struktur-struktur tersebut merupakan struktur-struktur kekuasaan dalam dimensi-dimensi utama kehidupan masyarakat dan hal ini menentukan kedudukan masing-masing suatu golongan sosial, apa yang mereka masukkan dan apa yang mereka dapatkan dari proses-proses tersebut (Suseno, 1982: 331-332). Implikasinya, bobot untuk memperjuangkan keadilan sosial pun juga lebih berat ketimbang sekedar mengharapakan jangkauan sosial negara. Sebagaimana yang dijelaskan Suseno, bahwa negara diharapkan bersikap sosial berarti bahwa negara diharapkan membantu mereka semua yang menderita dan terlalu lemah untuk membantu diri mereka sendiri. Maraknya kesalahpahaman mengenai Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang berkembang di masyarakat melahirkan stigma terhadap HIV dan Orang dengan

HIV dan AIDS (ODHA). Stigma yang diberikan masyarakat ini berdampak buruk pada ODHA, mengingat pelabelan cap buruk umumnya disertai dengan tindakan diskriminatif. Salah satu stigma yang disematkan masyarakat terhadap HIV, yakni dianggap menjadi faktor penghambat pembangunan dan penyebab kesejahteraan menurun. Untuk menyelaraskan antara kehendak pemenuhan hak dan pembawaan individu dengan kewajiban sosial demi memenuhi kebutuhan dan kebajikan kolektif, Rawls mengajukan dua prinsip keadilan untuk menjaga harmoni antara hak individu dengan kewajiban sosial dengan mendefinisikan keadilan sebagai fairness (kewajaran). Keadilan dalam skema sosial secara mendasar bergantung pada bagaimana hak-hak dan kewajiban fundamental diterapkan pada peluang ekonomi serta kondisi sosial dalam berbagai sektor masyarakat.

2. PROBLEM KETIDAKADILAN REMAJA PENYANDING HIV

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yan Michael, Wakil Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Victory Plus, problem keadilan yang dihadapi oleh remaja yang terpapar HIV/AIDS pada umumnya ialah diskriminasi. Diskriminasi terhadap remaja yang terpapar HIV/AIDS sebagian besar datang dari penerimaan masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat terhadap metode penularan virus HIV/AIDS menjadi faktor utama diskriminasi terhadap remaja yang terpapar HIV/AIDS, misalnya, masyarakat masih menganggap bahwa HIV/AIDS merupakan penyakit perilaku. Terdapat pandangan menggeneralisasi dalam masyarakat bahwa orang-orang yang terpapar HIV/AIDS dikarenakan faktor perilaku yang menyimpang, dalam hal ini cenderung pada perilaku pergaulan bebas. Sedangkan, faktor penularan virus HIV/AIDS bervariasi, seperti perilaku seks beresiko dan menyimpang, penggunaan jarum suntik, tertular dari orangtua. Penularan melalui orangtua terjadi karena juga tidak lepas dari ketidaktahuan sang ibu ketika dirinya terinfeksi melalui suaminya/yang lain. sehingga tidak ada intervensi medis sejak dini. Selain melalui orang tua, penularan pada remaja juga bisa akibat kenakalan remaja, tetapi kasus tersebut sangat sedikit.

3. ANALISIS

Pancasila sering disebut sebagai pandangan hidup (way of life) dan ideologi bangsa Indonesia. Menurut Darmodiharjo (1979), Pancasila sebagai pandangan

hidup digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Artinya, semua tingkah laku dan tindak-perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila, karena Pancasila sebagai pandangan hidup selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dilepas- pisahkan satu dengan yang lain; keseluruhan sila di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis (Darmodihardjo, 1979). Menurut Darmodihardjo (1979), 'Keadilan Sosial' berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual, sedangkan 'seluruh rakyat Indonesia' berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sila Keadilan Sosial ini merupakan tujuan dari empat sila yang mendahuluinya dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Darmodihardjo dalam Siregar, 2014). Keadilan memiliki dua bentuk penerapan secara umum, yaitu jaminan agar berbagai hak maupun kebebasan setiap orang tidak dilanggar oleh siapapun (termasuk oleh pemerintah), dan perlakuan yang sama terhadap orang sesuai dengan jasa dan kemampuannya. Keadilan dapat terwujud jika tidak ada pelanggaran atas hak/kebebasan seseorang dan perlakuan yang sama terhadap setiap orang. Seseorang berlaku adil jika memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya diberikan, tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain, memandang setiap orang sama harkat dan martabatnya, dan memperlakukan setiap orang secara layak dalam semua tugas dan kewajibannya baik dalam perdagangan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.. Keadilan sosial merupakan suatu idealisme dalam Pancasila diciptakan setelah Indonesia merdeka untuk menciptakan suasana yang kuat di mana setiap orang manusia benar-benar dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam semua bidang kehidupan yaitu keadilan personal, Keadilan Sosial. Negara dan masyarakatnya harus memenuhi kewajiban mereka satu sama lain. Dalam prinsip kelima dari

Pancasila terdiri nilai-nilai representasi tujuan pokok negara dalam kehidupan. Oleh karena itu, prinsip kelima terdiri dari bentuk nilai-nilai keadilan sehingga konsekuensinya harus ada dalam kehidupan sosial dan harus mencakup setidaknya tiga aspek: Pertama, keadilan distributif, yaitu hubungan antara negara dengan warganya, dalam arti negara mempunyai kewajiban memenuhi keadilan dalam bentuk membagi keadilan, kemakmuran, bantuan, subsidi dan juga kesempatan dalam kehidupan dengan didasarkan atas hak dan kewajiban; kedua, keadilan hukum, merupakan hubungan keadilan antara warga negara dengan warga negaranya, warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku di negara; ketiga, keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Hal ini jelas bahwa prinsip keadilan adalah untuk menjadi dasar persatuan nasional. Keadilan hanya mungkin dalam demokrasi. Kata adil dapat ditemukan dalam Prinsip atau Sila kedua: “....yang adil dan beradab”. Keadilan ditemukan pada prinsip kedua tersebut, yaitu realitas keadilan manusia, menjadi dasar dan jiwa yang melandasi Keadilan pada prinsip kelima/Sila kelima Pancasila: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial. Hubungan antara sesama menjadi yang mewakili hubungan mendasar dalam hidup dengan antar sesama. Bentuk keadilan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara yang disebut keadilan sosial atau keadilan dalam masyarakat luas, yaitu dalam arti keadilan hidup berdampingan dengan kebaikan, hidup berdampingan dalam bentuk masyarakat dan juga hidup berdampingan dalam bentuk bangsa dan negara (Herawati 2014).

4. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, telah terjadi beberapa praktik yang dinamis pada penerapan konsep keadilan sosial Pancasila pada anak-anak penyandang HIV/AIDS. Pertama, terjadi diskriminasi terhadap remaja yang terpapar HIV/AIDS, atau secara teoritik terdapat diskriminasi terhadap nilai keadilan komutatif. Hal ini dipengaruhi oleh struktur dasar masyarakat yang belum menghargai hak atas individu sebagai suatu kewajiban moral, serta disokong oleh etika Harmoni, bahwa mereka yang terkena HIV/AIDS secara kolektif dianggap menurunkan harmonisasi relasi dalam struktur

masyarakat di Jawa Tengah. Didorong oleh salah satunya kurangnya pengetahuan tentang virus HIV/AIDS, muncul situasi masyarakat yang merasa insecure tertular virus tersebut. Prinsip etika Harmoni yang diyakini secara kolektif melahirkan suatu anggapan bahwa sikap diskriminasi tersebut tidak jahat secara moral bahkan dianggap wajar. Bagi warga penyandang HIV/AIDS, tindakan tersebut problematis (jika bukan tidak adil) sebab hak dan kebebasan mereka sebagai warganegara terbatas oleh prinsip etika Harmoni yang berlaku secara kolektif. Namun, karena warga penyandang juga menjaga prinsip harmoni, mereka tidak berminat dan sebagian tidak berani untuk membuka status virus mereka secara terbuka, walaupun ada juga dari beberapa responden yang percaya diri bicara terbuka status mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Revi, and Nanda Ratri Fadilah. "Implementation of Pancasila Values in Students in Everyday Life." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 51-57.
- Annisa, Miftia Nur, Rika Maryani, and Aris Prio Agus Santoso. "Employment Legal System for TKI in Legal Protection." *Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law*. 2022.
- Aryono, and Rina Arum Prastyanti. "Criminal Liability in Withdrawing Fiduciary Collateral to Leasing Parties by Debt Collectors Based on Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary Guarantee." *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 6.2 (2023).
- Firdaus, Muhammad Ihsan. "The Legalization of Interfaith Marriage in Indonesia (Between Universalism and Cultural Relativism)." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 64-72.
- Hapsari, Ajeng Maulana, and Allia Amanda Febri Wahyuningtiyas. "Student Action in Defending the Country Upholding Pancasila Values." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 58-63.
- Kamiliya, Sauda, and Shinta Selvianika. "The Decline of the Function of Pancasila as the Moral of the Nation and the Basis of the State." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 72-77.

- Kenjiro, Jordan, Arda Tri Angga, and Aris Prio Agus Santoso. "Hak Asasi Manusia Di Tinjau Dari Sudut Pandang Keadilan (Studi Kasus Munir)." *Prosiding HUBISINTEK 1* (2020): 113-113.
- Kusuma, Ersya. "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Sanskara Hukum dan HAM* 1.03 (2023): 97-101.
- Prasetya, Ajie, Aris Prio Agus Santoso, and Yulia Emma Sigalingging. "Sanctions Of Castrated For Children Viators Reviewing From Human Rights." *International Journal Law and Legal Ethics (IJLLE)* 3.2 (2022): 61-73.
- Rezi, et al. *Penegakan Hukum Sengketa Lingkungan PT Rayon Utama Makmur di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Rohsawati, Mawardhany, et al. "Tajamnya Pedang Jabatan Bisa Memenggal Keadilan." *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*. Vol. 3. No. 1. 2023.
- Santoso, Aris Prio Agus Santoso. "Pendidikan Kewarganegaraan". Jakarta: Trans Info Media. 2022.
- Santoso, Aris Prio Agus, et al. "Kemunculan Agama Baru Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Pandang Ham Dan Kerukunan Umat Beragama." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5.1 (2021).
- Santoso, Aris Prio Agus, et al. "Hak Reproduksi pada Penderita HIV/AIDS Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum dan Agama." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7.3 (2023).
- Sarwanto, Agus. "The Phenomenon of Juvenile Delinquency that Occurs in the Era of Globalization." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 45-50.
- Vinkasari, Elriza, et al. "Toleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia Untuk Mempertahankan Kerukunan." *Prosiding Hubisintek 1* (2020): 67-67.
- Wurnasari, Annissha Azzahra, et al. "Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas di Tengah Pandemi Covid-19." *Prosiding HUBISINTEK 1* (2020): 20-20.